

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Setelah bertahun-tahun dilanda konflik yang berkelanjutan, pada tanggal 26 Desember 2004 Aceh dilanda bencana gempa bumi yang berskala sangat kuat (8,9 skala Richter). Pusat gempa bumi ini terletak di Samudera Hindia pada posisi barat laut Pulau Sumatera. Dalam sekejap gempa ini menyebabkan gelombang tsunami yang memporakporandakan sebagian besar wilayah Aceh dan Nias di wilayah Indonesia. Gelombang tsunami ini juga menerpa sebagian wilayah Thailand, Srilanka, Maladewa, Bangladesh, Burma, bahkan sampai ke pantai Somalia di Afrika Timur.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) dalam Buku Utama Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia (PPRI) no 30 tahun 2005, jumlah korban yang terkena bencana di 20 kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperkirakan mencapai 126.602 orang meninggal dunia, dan 93.638 orang dinyatakan hilang. Sementara jumlah korban di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 130 orang meninggal dan 24 orang hilang. Bencana ini juga mengakibatkan 514.150 jiwa mengungsi di berbagai tempat yang tersebar di 21 kabupaten/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Besarnya bencana yang terjadi tidak hanya dapat dilihat dari besarnya jumlah korban manusia, namun juga dari luasnya daerah yang mengalami kerusakan. Sebanyak enam belas dari seluruh kabupaten/kota di Nanggroe Aceh mengalami kerusakan terkena gelombang tsunami. Kabupaten/kota yang mengalami kerusakan terparah antara lain, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Besar. Desa yang terkena dampak langsung tsunami adalah sebanyak 654 desa (11,4 persen), dan diperkirakan persentase keluarga miskin terkena tsunami mencapai 15,16 persen (63.977 KK) (lampiran 1 PPRI, 2005)

Selain mengakibatkan kerusakan fisik, tsunami juga memporak porandakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Sebagai contoh, sebelum terjadinya tsunami, lebih dari sepertiga penduduk Nanggroe Aceh Darussalam hidup dalam kemiskinan. Setelah terjadinya bencana, angka kemiskinan meningkat menjadi hampir separuh dari jumlah penduduknya dan korban bencana bergantung pada bantuan pangan dari luar. Sayangnya sejauh ini data dan kajian yang mendalam tentang kondisi sosial kapital di Aceh setelah terjadinya tsunami belum ada. Pertanyaan yang penting dan menarik adalah, apakah kapital sosial di Aceh juga “rusak” akibat tsunami tersebut?. Jika iya, aspek apa saja yang rusak dan aspek apa pula yang mampu bertahan? Hal ini sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Selanjutnya, bencana yang terjadi di Aceh telah menggerakkan datangnya bantuan darurat berskala nasional dan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara Nasional Indonesia dan pasukan militer dari berbagai negara memimpin upaya pencarian dan penyelamatan, menyalurkan bantuan dan melakukan kegiatan pembersihan awal lokasi daerah yang terkena bencana. PBB mengeluarkan permohonan dana bantuan darurat sebesar US\$800 juta untuk membantu negara-negara yang dilanda bencana tsunami. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga donor baik nasional maupun internasional juga turut terlibat memberikan bantuan untuk menangani bencana (*Eye on Aceh*, 2006).

Tiga bulan setelah bencana, upaya penanggulangan beralih dari penanganan keadaan darurat ke upaya pembangunan dan pemulihan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias agar dapat membangun hidup mereka kembali. Kegiatan pemulihan kehidupan penduduk yang selamat dari bencana dilakukan bersama-sama oleh berbagai staf dari 124 LSM internasional, 430 LSM nasional, lembaga-lembaga donor dan lembaga PBB, berbagai instansi pemerintah, instansi militer dan sebagainya.

Berbagai mekanisme baru dan inovatif untuk mendukung pendanaan dalam upaya pemulihan telah memberikan dukungan sumberdaya yang memadai. Lima belas negara donor telah sepakat untuk menyatukan bantuan mereka dalam Dana Multi Donor untuk Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias sebesar US\$525

juta, yang dikoordinasikan bersama-sama oleh Uni Eropa, Bank Dunia, dan BRR. Bank Pembangunan Asia meluncurkan proyek Bantuan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami dengan dana bantuannya sendiri sebesar US\$300 juta. Program-program hibah dan pinjaman lunak bilateral juga telah ditawarkan oleh Australia-Indonesia *Partnership for Reconstruction and Development*, Pemerintah Jepang dan Jerman, dan USAID serta beberapa negara lainnya dari seluruh dunia. LSM-LSM internasional dan organisasi-organisasi seperti Palang Merah/Bulan Sabit Merah, CARE, CARDI, *Catholic Relief Services*, *Mercy Corps*, *Oxfam*, *Save the Children*, *World Vision* dan lain-lain telah menggalang dana yang sangat besar untuk mendukung upaya bantuan dan pemulihan agar dapat berlangsung. Besarnya dana tersebut memberikan harapan bahwa “membangun kembali Aceh dan Nias yang lebih baik” dapat dilaksanakan dengan baik. Harapan terjadinya pemulihan berkesinambungan juga ditopang oleh penandatanganan perjanjian damai di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Perjanjian perdamaian ini mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan menelan korban sekitar 15.000 orang. (*Eye on Aceh*, 2006).

Dua tahun lebih setelah terjadi bencana, dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias¹ dan organisasi-organisasi non pemerintah baik dari luar maupun dalam negeri, berbagai kemajuan telah dicapai. Menurut data BRR (2007), kemajuan yang telah dicapai selama dua tahun antara lain, lebih dari 65,000 pengungsi dipindahkan dari tenda ke 15.000 rumah transisi, 57.000 rumah permanen telah dibangun, 623 gedung sekolah telah dibangun kembali, berbagai kegiatan mata pencaharian korban bencana sudah mulai normal dan berbagai kegiatan pemulihan lainnya telah dilakukan. Di Banda Aceh, dari total kebutuhan 18.434 rumah untuk korban tsunami, sudah terbangun sebanyak 10.663 unit rumah.

Bencana tsunami telah mengubah kondisi Lampulo yang semula dihuni 6.322 orang yang tersebar di empat dusun, yakni Tengku Tuan di Pulo, Malahayati, Tengku di Sayang, dan Teungku di Teungoh, berkurang menjadi

¹ Merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi dan usaha-usaha rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di NAD dan Nias, dengan masa kerja 2005 – 2009.

3.694 orang. Sebelum tsunami desa ini dikenal sebagai pusat kegiatan perikanan di Banda Aceh. Hampir 90 persen pendapatan penduduk di Lampulo bergantung pada hasil laut. Kerusakan yang terjadi akibat tsunami di Lampulo antara lain 1.200 rumah rusak dihantam gelombang, tambak penduduk yang rata dengan laut mencapai 127 hektare, dan hancurnya sarana dan prasarana umum lainnya.

Setelah lebih dari dua tahun terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami menimpa Lampulo dan penyelenggaraan program pemulihan pasca bencana dilakukan, perlu dikaji pelaksanaan program pemulihan kondisi masyarakat di desa Lampulo. Berdasarkan data dari kantor desa, kepala lorong dan koordinator posko bantuan dan program yang telah dijalankan pada warga Lampulo oleh lembaga-lembaga dari luar Lampulo dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Program Bantuan pada Korban Bencana Tsunami di Lampulo

No	Jenis Program	Lembaga
1	Bantuan bahan-bahan pokok, pakaian, tenda	Save The Children, American Red Cross, World Vision
2	Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan	Oxfam, Concern, Save The Children, Care International, Mer-C
3	Cash for Work	Save The Children, Kata Hati, Depnaker, American Red Cross
4	Paket Puasa dan Lebaran	Islamic Relief, Dinas Sosial, PMI
5	Sarana Umum (jalan, selokan, mushola, puskesmas, pelabuhan dan tempat pelelangan ikan dsb)	BRR, P2KP, Oxfam, BRI, Astra, Americare, CHF
6	Rumah Permanen	BRR, Care Internasional, Aceh Relief, Kata Hati.
7	Barak, tenda dan rumah sementara	GTZ, International F. Red Cross
8	Program untuk balita, anak dan wanita	Save The Children, Aceh Relief, Aceh Link

Sumber : Kantor Desa, Posko dan Wawancara.

Selain program yang disalurkan dan dijalankan melalui pemerintahan desa, posko bantuan bencana atau kepala lorong, masih ada beberapa program yang disalurkan oleh lembaga-lembaga bantuan diberikan secara langsung kepada korban bencana pribadi yang tidak tercatat di kantor desa.

Menurut penulis dari beberapa lembaga luar yang memiliki program di Lampulo yang menarik untuk dipelajari lebih jauh adalah peran Care International, Aceh Relief, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dan Kata Hati dalam program pemulihan di Lampulo, karena lembaga-lembaga tersebut mempunyai program secara terpadu pada masa gawat darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Care International. Lembaga ini merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang berkantor Pusat di Amerika Serikat. Organisasi ini dalam menjalankan program pasca bencana di Aceh bergabung dengan cabang Care Internasional dari Negara lain seperti dari Kanada, Inggris, Australia dan beberapa negara donor lainnya. Organisasi ini memulai kegiatannya dengan program tanggap darurat di Lampulo sejak Januari 2005. Berdasarkan survey dan pemetaan yang dilakukan, cakupan program yang dilaksanakan organisasi ini antara lain program perumahan, air dan kesehatan, mata pencaharian (seperti menjahit, berdagang, nelayan, bengkel dsb), peningkatan kapasitas masyarakat dan pengurangan resiko bencana. Melalui komunikasi dan sosialisasi program pada tahun 2005 akhirnya diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan *keuchik* (kepala desa) dan pihak Care International pada Agustus 2005. Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Care International menggunakan pendekatan partisipatif. Dalam menjalankan program Care International mempekerjakan staf (terutama di bagian kantor) yang berasal dari luar desa Lampulo (Aceh bagian lain, Medan, Jawa dsb) dan pekerja asing (luar Indonesia dari berbagai negara kebanyakan dari Amerika Serikat). Sedangkan orang dari desa Lampulo dilibatkan sebagai pekerja lapangan.

Pada umumnya para pekerja dari luar banda Aceh tinggal di asrama yang disediakan oleh organisasi ini. Permasalahan yang terjadi pada program perumahan, dari 250 unit rumah yang disepakati dibangun pada tahun 2005 hingga akhir 2007, yang sudah selesai dan bisa ditempati baru sebanyak 70 unit, sedangkan sisanya belum selesai dibangun dan terhenti pekerjaannya sejak awal tahun 2007. Selain itu masalah lain yang muncul adalah banyaknya keluhan penerima program selama pelaksanaan pembangunan rumah. Rumah yang sudah

selesai dibangun dan ditempati dinyatakan tidak layak secara teknis sehingga perlu dibongkar kembali.

Pada program matapencarian terjadi perubahan metode penyaluran bantuan karena permasalahan internal organisasi. Selain itu juga ada permasalahan dalam kelompok, yaitu kelompok sasaran berpartisipasi secara semu (hanya untuk mendapatkan bantuan), dan kelompok yang terbentuk tidak berkelanjutan dan administrasi distribusi bantuan yang tidak berjalan baik. Hasil yang dicapai untuk program perumahan selama dua tahun lebih baru 30 % yang sudah selesai dibangun, meskipun sebagian dinyatakan tidak layak secara teknis. Untuk program mata pencarian hasil yang dicapai dana tersalurkan, barang terdistribusi, kelompok terbentuk, sehingga korban bencana dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan penghasilan.

b. Aceh Relief. Lembaga ini merupakan suatu organisasi konsorsium antara organisasi non pemerintah nasional dengan organisasi non pemerintah *Compassion International* yang berasal dari Amerika Serikat. Aceh Relief mulai melakukan program pasca bencana sejak Januari 2005. Pada awalnya desa Lampulo bukanlah daerah yang menjadi sasaran program organisasi ini. Sasaran program Aceh Relief pada awalnya adalah desa Lhoh dan Lampuyang yang terletak di Pulau Aceh². Karena transportasi ke Pulo Aceh hanya dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi laut, dan sarana pelabuhan terdekat yang masih dapat digunakan terletak di dusun Teungku Disayang desa Lampulo (lorong tiga) desa Lampulo, maka Aceh Relief selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat di lorong tiga.

Pada awalnya melalui posko di lorong tiga, anggota masyarakat terlibat sebagai tenaga kerja upahan untuk mengangkut bantuan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk program Aceh Relief di Pulo Aceh. Namun karena sudah terjalin hubungan yang baik antara staf Aceh Relief dengan ketua posko dan beberapa warga lorong tiga, sehingga warga lorong tiga meminta agar Aceh Relief dapat mengalokasikan program untuk desa Lampulo khususnya lorong tiga. Setelah terjadi peninjauan dan kesepakatan, akhirnya Aceh Relief melakukan program di lorong tiga dengan membangun rumah mulai Oktober 2005 dan selesai Februari

² Di Desa Lhoh dan Lampuyang, Aceh Relief membangun rumah sebanyak 110 unit yang dilakukan sejak Mei 2005 dan diselesaikan pada bulan September 2005

2006. Program yang dilakukan oleh Aceh Relief di desa Lampulo antara lain pembangunan rumah 36 m^2 sebanyak 91 unit, distribusi alat produksi (perahu dan alat tangkap, becak motor dan modal usaha) yang diberikan secara perorangan (bukan kelompok) dan program untuk ibu dan anak.

Pendekatan yang dilakukan Aceh Relief dalam menjalankan program di lorong tiga menggunakan pendekatan partisipatif semu melalui beberapa orang warga lorong tiga yang diangkat sebagai staff lapangan. Masalah yang muncul antara lain beberapa rumah belum ditinggali, kenaikan harga bahan dan ongkos tukang, kualitas bangunan yang tidak memadai, bantuan perahu dan alat tangkap dan usaha yang tidak berkelanjutan, dan bantuan tumpang tindih dengan bantuan lembaga lain. Hasil dari program Aceh Relief di Lampulo sebanyak 91 unit rumah selesai terbangun dalam waktu empat bulan, perahu dan alat tangkap, becak motor dan bantuan modal usaha dapat disalurkan.

c. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Lembaga ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, melalui Peraturan Presiden no 30 tahun 2005 untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di NAD dan Nias. BRR mulai melakukan tugasnya sejak Juni 2005. Di Desa Lampulo cakupan program yang diselenggarakan adalah program rumah, distribusi alat produksi (nelayan, modal usaha), jalan, saluran, air bersih. Pendekatan yang digunakan pada awalnya non partisipatif melalui kontraktor dari luar Lampulo (luar Aceh : Jawa, Medan) lalu berubah menjadi partisipatif karena ada masalah efisiensi dan efektifitas. Masalah yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara harapan korban dan kemampuan BRR. Hasil yang dicapai adalah rumah sudah selesai sebanyak 120 rumah dalam jangka waktu dua tahun. Permasalahan yang muncul penerima bantuan ada yang mendapat lebih dari satu, sebagian tidak ditempati, tumpang tindih dengan lembaga lain dan kualitas rumah khususnya tahap pertama tidak memadai.

d. Kata Hati. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga non pemerintah lokal Aceh yang berdiri pada tahun 2001, yang pada awalnya mempunyai kegiatan untuk isu-isu demokratisasi, tata pemerintahan, formulasi kebijakan yang partisipatif dan penguatan hak-hak sipil. Namun pada pasca tsunami, dengan mendapatkan dukungan dana dari lembaga non pemerintah dari Jerman

(Diakonie), Kata Hati menjalankan kegiatan program pemulihan pasca bencana di desa Lampulo mulai dilakukan tahun 2005 sampai 2006. Cakupan program yang dijalankan Kata Hati di desa Lampulo yaitu program *cash for work* dan program pembangunan rumah tipe 45. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga ini dalam menjalankan programnya adalah melalui pendekatan partisipatif. Salah masalah yang dihadapi oleh lembaga ini di Lampulo adalah rumah yang dibangun sebagian tidak ditempati.

Dalam konteks pemulihan ini, maka pertanyaan yang sangat penting adalah, sejauh mana berbagai pihak yang melaksanakan program pemulihan tersebut baik pemerintah, LSM, maupun lembaga lainnya, telah memperhatikan dimensi kapital sosial dalam melaksanakan program-program pemulihan tersebut? Bagaimana fungsi atau peranan kapital sosial terhadap tingkat keberhasilan program pemulihan pasca bencana? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini hingga sekarang masih sangat sedikit atau bahkan tidak ada.

1.2. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bencana gempa dan tsunami di Aceh telah memporakporandakan kehidupan masyarakat Aceh, termasuk di desa Lampulo. Data yang menyangkut kerusakan pada aspek fisik seperti korban jiwa (meninggal maupun hilang), bangunan yang hancur, jalan yang rusak, dan sebagainya sudah tersedia dengan cukup baik. Sementara itu, informasi dan pemahaman terhadap kerusakan pada dimensi sosial, termasuk kondisi kapital sosial, masih belum memadai. Padahal aspek ini juga sangat penting untuk difahami secara mendalam.

Selanjutnya, proses pemulihan yang dilakukan oleh berbagai pihak seyogyanya memperhatikan dimensi kapital sosial yang ada pada masyarakat. Tanpa memperhatikan kapital sosial yang ada dalam masyarakat lokal, suatu program pemulihan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Masalahnya, di sinipun belum tersedia informasi yang mendalam, misalnya apakah berbagai lembaga yang melakukan rehabilitasi di desa Lampulo telah memperhatikan dimensi kapital sosial yang ada pada komunitas di desa Lampulo, bagaimana

peranan kapital sosial dalam proses pemulihan di desa Lampulo. Oleh sebab itu, masalah ini juga sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Perhatian terhadap dimensi sosial dalam pemulihan bencana ini juga berkaitan dengan perubahan pendekatan penanganan bencana yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama tahun 1990 – 1999. Dalam dekade ini terjadi perubahan pendekatan dari kegiatan pemberian bantuan pascabencana (*disaster management*) menjadi usaha pencegahan, persiapan prabencana dan pengelolaan resiko bencana (*risk management*). Strategi pengelolaan resiko dalam proses penanganan bencana dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penguatan pemerintahan lokal, dan keterlibatan lembaga nonpemerintah dan masyarakat sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkecil kerentanan masyarakat sehingga kapasitasnya meningkat dalam menghadapi ancaman bencana. Dengan pendekatan ini diharapkan risiko bencana yang dihadapi oleh masyarakat menjadi berkurang, sehingga diharapkan dapat memperkecil korban dan kerugian yang terjadi dapat diperkecil. Oleh karena itu terjadi perubahan orientasi penelitian tentang bencana, berubah dari aspek-aspek teknis dan penanganan korban bencana menjadi pendekatan yang menekankan aspek kemasyarakatan (sosiologis), termasuk di dalamnya usulan pengelolaan pascabencana dalam pengembangan masyarakat secara terpadu (Blaikie dkk, 1994; Twigg and Bhatt, 1998; Quarantelli, 1989; Shaw dan Okazaki, 2003). Maskrey (1989) menyatakan pengelolaan bencana seharusnya tidak diatasi dengan pendekatan yang bersifat fisik saja, tetapi juga dikaitkan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat lokal di daerah rawan bencana.

Dalam kaitan dengan pendekatan pendekatan *risk management* ini, upaya untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana sering kali dikaitkan kapital sosial, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan norma dan jaringan yang mendukung tindakan kolektif. Konsep kapital sosial telah banyak digunakan dalam analisis masalah-masalah tindakan kolektif, antara lain masalah keluarga, sekolah dan pendidikan, pekerjaan dan organisasi, demokrasi dan pemerintahan, termasuk isu-isu pembangunan lainnya (Woolcock, 1998). Studi lain menunjukkan bahwa kapital sosial dapat memengaruhi kemajuan dan kesejahteraan suatu masyarakat (Fukuyama, 1995& 2001; Putnam, 1993;

Grootaert, 1999, Dasgupta dan Ismael Serageldin, 2000; Heffner, 2000). Namun berbagai studi tentang kapital sosial yang ada menunjukkan masih sangat sedikit yang mengaitkan fungsi kapital sosial terhadap penanganan bencana. Karena itulah dalam studi ini akan mengkaji bagaimana fungsi kapital sosial dalam mendukung keberhasilan program pemulihan pasca bencana.

Dari uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana wujud kapital sosial di desa Lampulo setelah peristiwa bencana gempa dan tsunami?
2. Bagaimana fungsi kapital sosial dalam menentukan tingkat keberhasilan program pemulihan pasca bencana tsunami di desa Lampulo?

1.3. Kajian Teori

1.3.1. Beberapa Pemikiran tentang Kapital Sosial

Pembahasan akademik tentang kapital sosial sejak 1980-an makin meningkat seiring berkembangnya konsep-konsep sosial yang digunakan untuk menganalisis proyek-proyek pembangunan. Ostrom (1992) mengemukakan bahwa kapital sosial mempunyai kaitan erat dengan kemampuan komunitas dalam membangun institusi atau pranata sosial (*crafting institution*)³. Bank Dunia termasuk kelompok yang paling serius mengembangkan konsep kapital sosial karena meyakini bahwa kapital sosial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (World Bank, 1999).

Bourdieu (1986) mendefinisikan kapital sosial sebagai sumber potensial yang terkait dengan posisi dan relasinya dalam suatu kelompok dan jaringan sosial. Kapital sosial dapat memberikan pada masing-masing anggotanya dukungan berupa kapital kolektif⁴. Coleman (1988:16) mendefinisikan kapital

³ Ostrom mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan yang digunakan secara aktual oleh sekelompok individu dalam mengorganisasi tindakan yang berulang-ulang, yang memengaruhi para anggotanya.

⁴ Menurut Bourdieu modal kolektif pertama berbetuk modal ekonomi, yang dapat berupa uang dan kepemilikan barang (*property right*); kedua modal budaya dan ketiga berbentuk kapital sosial, yang terbentuk kewajiban sosial (1986:243).

sosial melalui fungsinya. Keberadaan kapital sosial tidaklah tunggal, namun terdiri dari sejumlah entitas dengan dua elemen utama, yaitu aspek struktur sosial dan aspek fungsi yang memfasilitasi tindakan-tindakan para aktor. Tindakan para aktor itu dilakukan baik secara individu maupun kelompok dalam suatu struktur untuk mencapai suatu tujuan. Dalam analisisnya terhadap kinerja pendidikan siswa Sekolah Menengah Atas misalnya, Coleman (1988, 1990) berpendapat bahwa kepercayaan, kewajiban, harapan dan informasi, serta norma yang berkaitan dengan sanksi merupakan bentuk kapital sosial yang diperlukan baik di luar maupun di dalam keluarga agar murid dapat berprestasi baik. Hal ini juga dianggap sebagai “*closure*” jaringan sosial, baik yang berbentuk hierarki vertikal antara para orangtua dan anak, dan jaringan horisontal di antara murid. Namun yang lebih penting adalah ikatan horisontal di antara para orangtua murid dalam memberikan dukungan terhadap prestasi pendidikan anak mereka. Coleman menghitung pencapaian individu yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan mekanisme tindakan kolektif yang terkait pada motivasi rasionalitas individu.

Putnam, Leonardi, dan Nanetti (1993) memberikan pendapat lain mengenai kapital sosial. Dalam studinya mereka menyimpulkan bahwa terbentuknya kewarganegaraan, merupakan suatu proses yang terakumulasi dalam periode sejarah yang panjang dari suatu wilayah. Kewarganegaraan ini memengaruhi kinerja pemerintahan dan tingkat partisipasi warganegara yang akan diindikasikan pada perkembangan ekonomi. Putnam dan kawan-kawan memandang kapital sosial sebagai seperangkat asosiasi horisontal, yaitu norma dan partisipasi masyarakat. Kapital sosial diukur melalui empat indikator yaitu, kelompok pembaca surat kabar, jumlah klub olah raga dan kebudayaan, tingkat partisipasi dalam pemilihan umum, serta partisipasi dalam pemilihan umum.

Serageldin dan Grootaert (2000) memandang institusi hukum, institusi pemerintah, dan institusi pengadilan sebagai bentuk kapital sosial. Bentuk kapital sosial ini merupakan kategori paling luas dari kapital sosial. Grootaert dalam penelitian mengenai kapital sosial di Indonesia (1998), menggunakan interaksi antara institusi, hubungan, sikap dan nilai, sebagai variabel untuk melihat peran kapital sosial dalam perkembangan ekonomi dan sosial.

Uphoff (2000), membagi kapital sosial dalam dua kategori yaitu struktural dan kognitif. Kategori struktural meliputi peran, peraturan, preseden dan prosedur berbagai jaringan yang memberikan sumbangan untuk bekerja sama, dan khususnya sebagai tindakan kolektif yang saling menguntungkan. Kategori kognitif merujuk pada proses mental dan hasil ide-ide, yang menopang kebudayaan, seperti norma, nilai, sikap dan kepercayaan yang memberikan sumbangan pada kerja sama dan tindakan kolektif yang saling menguntungkan.

Fukuyama (1993, 1999) mengembangkan kapital sosial sebagai keberadaan norma-norma atau nilai-nilai informal bersama (terutama *trust*) yang terwujud di antara anggota dalam suatu kelompok yang menghasilkan kerja sama di antara mereka.⁵

Turner dalam Dasgupta (2000:95) mendefinisikan kapital sosial dengan melihat kekuatan-kekuatan yang menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial yang mengakibatkan peningkatan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Sedangkan Lawang (2005) berpendapat bahwa kapital sosial berkembang sesuai dengan derajat integrasinya dengan kapital-kapital yang lain. Sinergi kapital fisik⁶, kapital manusia⁷ dan kapital sosial tidak dilihat secara terpisah-pisah, karena kapasitas yang terkandung dalam masing-masing kapital dapat dipergunakan secara bersama-sama menjadi kekuatan yang berguna untuk pengelolaan suatu program.

Bank Dunia dalam Lawang (2005:213) juga memberikan definisi berkaitan dengan sosial kapital, yaitu yang menggabungkan norma, institusi dan hubungan sosial yang mendasari kerja sama di antara individu. Bank Dunia telah melakukan studi dalam sebelas topik mengenai kapital sosial: kriminalitas dan kekerasan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, nutrisi, dan kependudukan, teknologi informasi, kemiskinan dan pembangunan ekonomi, pembangunan pedesaan, pembangunan perkotaan,

⁵ Yang mempunyai pengaruh sebesar 20 % dalam suatu keberhasilan ekonomi, dalam masyarakat Amerika berada dalam jaringan organisasi formal sedangkan dalam masyarakat di Cina berada dalam jaringan kekerabatan dan keluarga.

⁶ Kapital fisik merupakan suatu bentuk yang sengaja dibuat manusia untuk keperluan tertentu dalam suatu proses produksi barang atau jasa, yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan pendapatan di masa yang akan datang (Lawang, 2005:11)

⁷ Kapital manusia menunjuk pada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu (Lawang, 2005:13)

penyediaan air dan sanitasi (World Bank, 2003). Sedangkan Woolcock (1998) mencoba melakukan kategorisasi kapital sosial dalam tujuh bidang: teori sosial dan pembangunan ekonomi, keluarga dan perilaku remaja, pendidikan, kehidupan kelompok, pekerjaan dan organisasi, demokrasi/pemerintahan dan masalah-masalah tindakan kolektif

Dari seluruh uraian pembahasan tentang kapital sosial ini dirangkum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Definisi kapital sosial menurut beberapa ahli

Penulis	Tertambat pada	Kapital social (Variabel independen)	Variabel dependen
Coleman	Struktur sosial, hubungan sosial, institusi	Fungsi kewajiban, harapan, layak dipercaya; saluran; norma, sangsi, jaringan organisasi	Tindakan aktor atau aktor dalam badan hukum
Putnam	Institusi social	Jaringan, norma, kepercayaan	Keberhasilan ekonomi, demokrasi
Fukuyama	Agama, filsafat, budaya	Kepercayaan, nilai	Kerja sama untuk mencapai keberhasilan ekonomi
Woolcock	Struktur sosial, mikro, meso makro	Ikatan intrasosial (<i>bonding</i>), jaringan kerjasama antar komunitas (<i>bridging</i>), jaringan dengan lembaga formal (<i>linking</i>)	Pengembangan komunitas
Bank Dunia		Institusi, norma, hubungan	Tindakan social
Turner	Hubungan social	Kekuatan	Potensi perkembangan ekonomi
Uphoff	Struktural dan kognitif	Struktural : aturan, proses, prosedur, peranan, mekanisme, kerjasama. Kognitif : norma, nilai, sikap, dan keyakinan	Bentuk-bentuk perilaku untuk mencapai tujuan secara terkoordinasi
Lawang	Struktur sosial, mikro, meso, makro	Kekuatan sosial komunitas bersama kapital-kapital yang lainnya	Efisiensi & efektifitas dalam mengatasi suatu masalah

Sumber : (Lawang, 2005;210 dan dari berbagai sumber).

1.3.2. Kritik Terhadap Kapital Sosial

Sementara banyak dukungan dan studi telah dilakukan dengan menggunakan analisis kapital sosial, namun pada sisi lain ada kritik yang diarahkan pada teori ini, khususnya mengenai definisinya yang masih dianggap sumir. Bagi ahli ekonomi, ide pengukuran kepercayaan sebagaimana kapital pada umumnya tidak dapat diterima. Arrow (2000) berpendapat ada tiga persyaratan untuk dianggap sebagai kapital: pertama, perluasan pada waktu; kedua, nilai pengorbanan sekarang untuk manfaat yang akan datang; ketiga, dapat dipindahtempatkan. Dia menambahkan kapital sosial tidak memenuhi persyaratan kedua, bahwa “motif interaksi bukanlah motif ekonomi”. Pada sisi lain, ahli sosiologi juga mempertanyakan metode pengumpulan data untuk analisis kapital sosial (lihat Levi, 1996; Fox, 1996; Tarrow, 1996), karena komunitas sering kali dianggap sebagai kelompok homogen sehingga sampling data tidak menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Fine dan Green (2000) mengkritisi kapital sosial karena dampak konflik kelas tidak terlihat dalam pembahasan teori kapital sosial. Dengan perkembangan wacana yang berbeda mengenai kapital sosial, timbul pertanyaan apakah teori kapital sosial merupakan suatu konsep yang berguna untuk semua kasus. Kritik teori kapital sosial terutama terkait dengan kecenderungannya pada akhir-akhir ini berkaitan dengan perdebatan antara peneliti kapital sosial dengan para pengkritik paradigma konstruktivis, yang memusatkan sebagian besar pada sisi yang positif teori kapital sosial, meskipun definisinya dianggap belum dibahas dengan jelas (Schuller, Baron and Field 2000, Fine and Green 2000).

Seperti yang dikemukakan Coleman (1988, 1990) dan Putnam et al. (1993), studi kapital sosial cenderung menyoroti manfaat dan sisi positif kapital sosial dan cenderung mengabaikan sisi negatifnya (Portes dan Landolt, 1996). Sering kali kepercayaan dan jaringan justru dapat menjadi penyebab terjadinya eksklusivitas sosial, hambatan kemajuan individu dalam kelompok tertentu, berkembangnya kelompok sosial yang tak dikehendaki seperti gerombolan dan mafia (Portes and Landolt 1996). Studi empiris mengenai kapital sosial yang negatif telah dilakukan oleh Browning, Dietz and Feinberg (2000) yang memusatkan pada kriminalitas perkotaan. Didasarkan pada fakta bahwa para

pelaku kriminalitas sering kali merupakan tetangga terdekat korban, mereka berpendapat bahwa sementara jaringan sosial meningkatkan dalam ikatan bertetangga, maka kapital sosial untuk bertindak kriminal juga meningkat. Akibatnya komunitas seperti itu perlu melakukan pengendalian sosial lebih ketat.

Banyak kritik terhadap kapital sosial tidak sepenuhnya menolak teori kapital sosial, sama seperti kapital manusia yang masih belum dianggap sebagai kapital sampai saat ini. Perlu waktu untuk membuat kapital sosial lebih konkret dan bisa diterima sebagai konsep. Banyak studi empiris telah dilakukan untuk mempertajam konsep dan metodologinya. Studi Krishna (2002a) berusaha untuk menganalisis tingkat partisipasi demokrasi dengan menggunakan kapital sosial di komunitas pedesaan di India. Krishna (2002a) mengukur kapital sosial menggunakan enam aktivitas lokal sebagai ganti asosiasi olah raga/budaya atau kelompok relawan seperti yang digunakan dalam studi Putnam et al. (1993) yang jarang ditemukan di daerah pedesaan India. Krishna menemukan bahwa pengaruh kapital sosial lebih menonjol di kelompok atau komunitas kecil. Dia menyimpulkan bahwa peningkatan ikatan komunitas akan meningkatkan kapital sosial. Krishna juga berpendapat bahwa kapital sosial menyediakan “perekat” dan mampu “menggerakkan” aksi kolektif bagi demokrasi, meskipun kemampuan agen juga diperlukan (Krishna 2002a, 2002b).

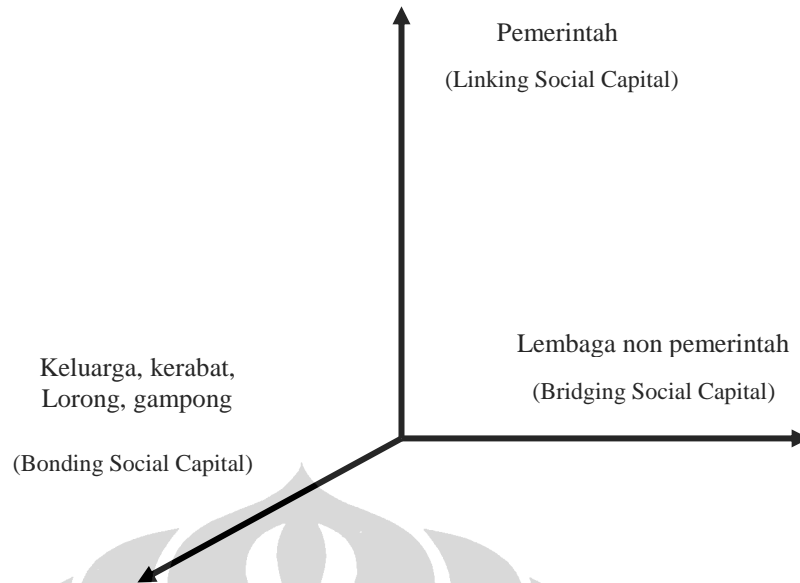
1.3.3. Kerangka Teori Studi

Berdasarkan pengalaman dan rekomendasi *Asia Disaster Planning Comitte* (ADPC), strategi *Disaster Risk Management* (DRM) merupakan pendekatan gaya Asia yang memperhitungkan semua potensi yang ada dalam masyarakat untuk terlibat dalam mengurangi risiko bencana. Potensi yang sudah tersedia adalah pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Salah satu *lessons learnt* yang diperoleh dalam berbagai penanganan bencana tercermin dalam pandangan bahwa “*top-down and bottom-up DRM strategies should be implemented simultaneously*” (ADPC, 2006). Pendekatan ADPC ini sesuai dengan kerangka yang dikemukakan oleh Woolcock yang mengintegrasikan tiga kapital sosial utama. Woolcock mengintegrasikan *bonding social capital* yang ada dalam masyarakat atau kelompok sosial, *bridging social*

capital yang muncul dan berkembang melalui hubungan kelompok dalam dengan kelompok luar secara horizontal, dan *linking social capital* yang muncul dan berkembang melalui hubungan antara kelompok dengan pemerintah.

Woolcock (2000) melakukan analisis dan membagi kapital sosial dalam tiga kategori, *pertama, bonding social capital*, yakni ikatan dalam anggota keluarga, tetangga, sahabat dekat, dan asosiasi bisnis dengan kategori demografis yang sama. *Kedua, bridging social capital*, yakni ikatan di antara orang yang berbeda etnis, geografis, latar belakang pekerjaan tetapi dengan latar belakang status ekonomi dan pengaruh politik sama. *Ketiga, linking social capital*, ikatan di antara komunitas dan pengaruh dalam organisasi formal seperti bank, sekolah, polisi dsb. Menurut Woolcock orang miskin cenderung mempunyai *bonding social capital* lebih kuat, namun kurang kuat dalam *bridging social capital*, dan lemah dalam *linking social capital*, yang justru mempunyai peran penting dalam memberikan lingkungan untuk perkembangan ekonomi.

Berdasarkan pemikiran Woolcock, pada saat terjadinya bencana peran *bonding capital social* dalam mendukung keberadaan masyarakat melemah. Dalam situasi ini maka peran *bridging* dan *linking capital social* dalam memberikan dukungan terhadap korban bencana menjadi sangat penting. Namun ini dalam penanganan pasca bencana alam relasi *bonding* dan *bridging social capital* dapat berubah dengan cepat karena relasinya yang berlangsung singkat, sementara itu *bonding social capital* belum menguat. Hal ini menjadikan *bonding capital social* masih rentan sebagai jaring pengaman dalam jangka panjang. Dalam kondisi yang demikian *linking social capital* dapat memainkan peran yang penting dalam mengurangi kerentanan *bonding social capital* dalam memberikan dukungan terhadap anggotanya.



Gambar 1.1. Jaringan Kapital Sosial

Sumber : Woolcock, 1998

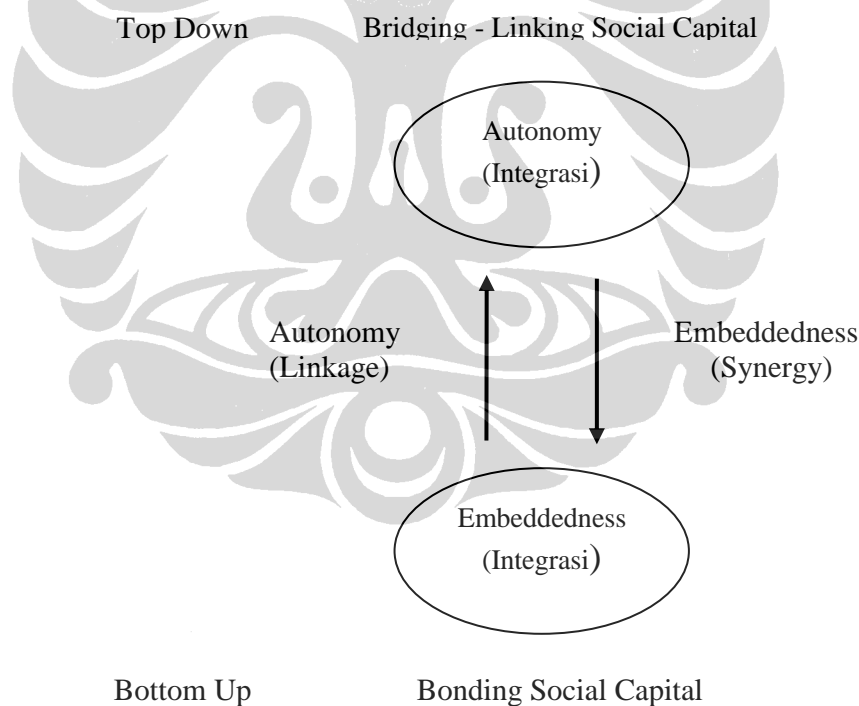
Woolcock (1998) mengembangkan empat model kapital sosial dalam arti jaringan sosial. Dua bentuk jaringan merupakan kapital sosial yang muncul dalam pendekatan pembangunan yang bersifat "*bottom up*", sedangkan dua jaringan lagi merupakan kapital sosial yang muncul dalam pendekatan pembangunan yang bersifat "*top down*". Dua jenis kapital sosial yang muncul dalam pendekatan pembangunan yang bersifat "*bottom up*" tersebut adalah "integrasi" dan jejaring (*linkage*). Integrasi (*integration*) merujuk pada ikatan dalam komunitas itu sendiri (*intracommunity ties*), sedangkan jejaring (*linkage*) merupakan tingkat jangkauan komunitas berhubungan dengan keberadaan organisasi dan sumber daya sosial yang berasal dari luar komunitas tersebut. Pada masyarakat yang lebih terintegrasi dan mempunyai jaringan luar komunitas tinggi, memungkinkan munculnya peluang untuk mendapatkan dukungan sumber daya sosial lebih tinggi.

Untuk pendekatan *top down*, bentuk kapital sosial yang pertama disebut oleh Woolcock sebagai integritas. Dalam studi ini, agar tidak rancu dengan istilah integritas yang mengacu pada penilaian individual, istilah yang digunakan integrasi organisasi. Integrasi organisasi merujuk pada tingkat efisien dan efektifitas suatu organisasi, maupun koherensi dan kapasitas organisasi. Seperti kata Keyes (2001), "*integrity is the term applied to intra-integration of individual top-down organizations*". Selanjutnya, bentuk kapital sosial yang kedua pada

pendekatan top-down disebut oleh Woolcock dengan istilah sinergi. Sinergi merupakan jaringan organisasi eksternal di tingkat atas antara negara dan lembaga ekonomi, yang merupakan jaringan kunci antara sektor privat dan publik.

Bentuk kapital sosial yang dilakukan oleh organisasi dengan pendekatan *top down* disebut *top down social capital*. Sedangkan bentuk kapital sosial yang berasal dari komunitas dengan pendekatan *bottom up* disebut *bottom up social capital* Keyes (2001:137).

Kombinasi aspek integrasi organisasi dan sinergi dalam *top down social capital*, menghasilkan empat varian kinerja kapital sosial. *Bottom up social capital* juga menghasilkan empat varian kinerja *capital social*. Skema jaringan sosial Woolcock mengenai kapital sosial *top down* dan *bottom up* beserta kinerja dari berbagai kombinasi keempat jenis kapital sosial ini disajikan dalam Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Pembangunan *top down* dan *bottom up* dan bentuk kapital sosial.

Sumber : Woolcock, 1998

Sinergi dari jaringan atas (*bridging dan linking social capital*) seharusnya dapat berinteraksi ke jaringan bawah (*bonding social capital*), dan sebaliknya jaringan dari bawah dapat berinteraksi ke jaringan atas. Interaksi antar kedua kelompok jaringan dapat mencapai hasil optimal, bila integrasi dalam komunitas lokal didukung oleh korporat yang kohesif dan berkewargaan yang bekerja secara sinergis dengan pemerintahan yang efektif dan efisien. Interaksi antara kapital sosial pendekatan “top down” dan “bottom up” menimbulkan persoalan dilematis karena memunculkan enam belas kemungkinan “kinerja hasil” yang berbeda dalam pengertian kapital sosial. Kinerja yang terbaik disebut “*beneficent autonomy*”, dimana interaksi antar kapital sosial pendekatan “top down” dengan kapital sosial pendekatan “bottom up” dalam kategori tinggi. Pada sisi yang lain, kinerja yang terburuk disebut “*anarchic individualism*”, suatu keadaan dimana kapital sosial di tingkat akar rumput dan tingkat atas sistem kelembagaan dalam interaksi atas dan bawah dalam kondisi rendah (lihat Tabel 1.2). Woolcock mendefinisikan kapital sosial sebagai relasi sosial (jaringan) di dalam komunitas dengan pendekatan yang bersifat *bottom up* dan organisasi luar dengan pendekatan yang bersifat *top down*. Relasi jaringan dalam komunitas dan organisasi luar ini dapat memunculkan kinerja kapital sosial yang menciptakan peluang maupun hambatan dalam suatu program.

Tabel 1.3. Kinerja Hasil Relasi antar Kapital Sosial

Kemungkinan	Kapital Sosial Bottom-up		Kapital Sosial Top-Down		Hasil Kinerja
	Integrasi	Jejaring	Sinergi	Integrasi	
16	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Beneficent autonomy
15	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	
...					
3	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	
2	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	
1	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Anarchic individualism

Sumber : Woolcock, 1998

Pandangan “*top down*” dan “*bottom up*” dalam kerangka kerja kapital sosial merupakan hal yang dinamis tidak hanya di tingkat bawah (integrasi dan jejaring) dan di tingkat atas (sinergi dan integrasi); tetapi juga merupakan proses yang interaktif diantara komunitas (bawah) dan organisasi atau pemerintah (atas).

1.3.4. Teori Struktur Sosial

Kapital sosial merupakan suatu kekuatan yang tertambat pada struktur sosial. Menurut Lawang (2005:94-95), berdasarkan proses terbentuknya struktur sosial ada dua macam, yaitu *existing structure* dan *emergent structure*. Existing struktur merupakan struktur yang telah ada, diterima dan diteruskan antargenerasi melalui proses sosialisasi. *Emergent structure* yang muncul dari interaksi sosial, baik karena makna, penghargaan atau adanya kebutuhan dan permasalahan bersama yang muncul. Sedangkan dari cakupannya, struktur sosial dikategorikan dalam tiga macam, yaitu (i) struktur sosial mikro yang mencakup status-peran, norma, nilai, kontrol sosial, sosialisasi dan sebagainya, (ii) struktur sosial meso, menunjuk pada institusi-institusi sosial dalam masyarakat yang muncul untuk pengaturan pemenuhan kebutuhan masyarakat, (iii) struktur sosial makro yang menunjuk pada stratifikasi sosial.

Dalam studi ini analisis struktur sosial menggunakan struktur sosial meso. Struktur sosial meso menunjuk pada institusi-institusi sosial, baik yang ada sebelum terjadinya bencana (*existing structure*) maupun yang muncul setelah terjadinya bencana (*emergent structure*) yang memfasilitasi program-program pemulihan pascabencana. Menurut Smelser (1981:70) institusi sosial didefinisikan pada sekumpulan peran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Sedangkan Berger (1966) menunjuk pada perilaku yang dirancang dengan teratur, berpola, sehingga mempunyai struktur yang jelas. Kapital sosial yang dilihat dalam bentuk ketertambatannya pada institusi sosial dapat dilihat sebagai kapital institusional atau kapital relasional (Krishna, 2000a). Kapital institusional menunjuk pada peran, peraturan, sangsi, perilaku, kerangka hukum yang formal. Kapital relasional menunjuk pada hubungan, kepercayaan, nilai, ideologi, perilaku, keluarga, kesukubangsaan dan agama. Dalam pemahaman Rose (2000) wujud kapital sosial berupa jaringan sosial yang muncul dari kegagalan organisasi formal yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Ostrom melihat organisasi sebagai institusi sosial, yang dipergunakan untuk menganalisis kapital sosial organisasi irigasi (Ostrom, 2000).

Menurut Coleman (1988:19) kapital sosial merupakan nilai dari aspek-aspek struktur sosial bagi aktor sebagai sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Hal ini berarti struktur sosial tidak mempunyai nilai kapital sosial secara intrinsik, namun yang membuat bernilai adalah aktor. Oleh karena itu Coleman menolak determinisme struktur terhadap aktor. Menurut Weber dalam Lawang (2005:173) yang membuat struktur bersifat deterministik adalah pilihan aktor itu sendiri, sedangkan dalam pandangan Parsons hambatan itu berasal dari luar dan ditanggapi oleh individu dengan sukarela atau terpaksa. Dalam kaitan antara struktur dan aktor ini teori yang dikemukakan oleh Giddens dapat memberikan sumbangan untuk memperjelas antara relasi diantara keduanya dalam kaitan dengan konsep kapital sosial yang tertambat pada struktur.

Giddens (1997) mengemukakan teori strukturasi yang melihat struktur sosial tidaklah sama dengan ilmu alam, dimana agen (aktor) tidak dapat merubah struktur, akan tetapi di dalam kehidupan sosial masyarakat, ada kemungkinan dimana seorang agen dapat memengaruhi struktur sosial dimana ia menjadi bagian di dalamnya. Atas dasar itulah ia kemudian merumuskan teorinya yang dikenal dengan strukturasi, yang melihat hubungan antara struktur di satu pihak dan aksi dari agen di pihak lain (Giddens dan Turner, 1997: 6). Bahwa pada dasarnya dapat terjadi di dalam kehidupan sosial, seseorang (*agent*) dapat saja mempengaruhi struktur sosial melalui tindakan-tindakan tertentu yang dianggap terbaik bagi diri dan kelompoknya, dari pada berada di bawah tekanan struktur selamanya.

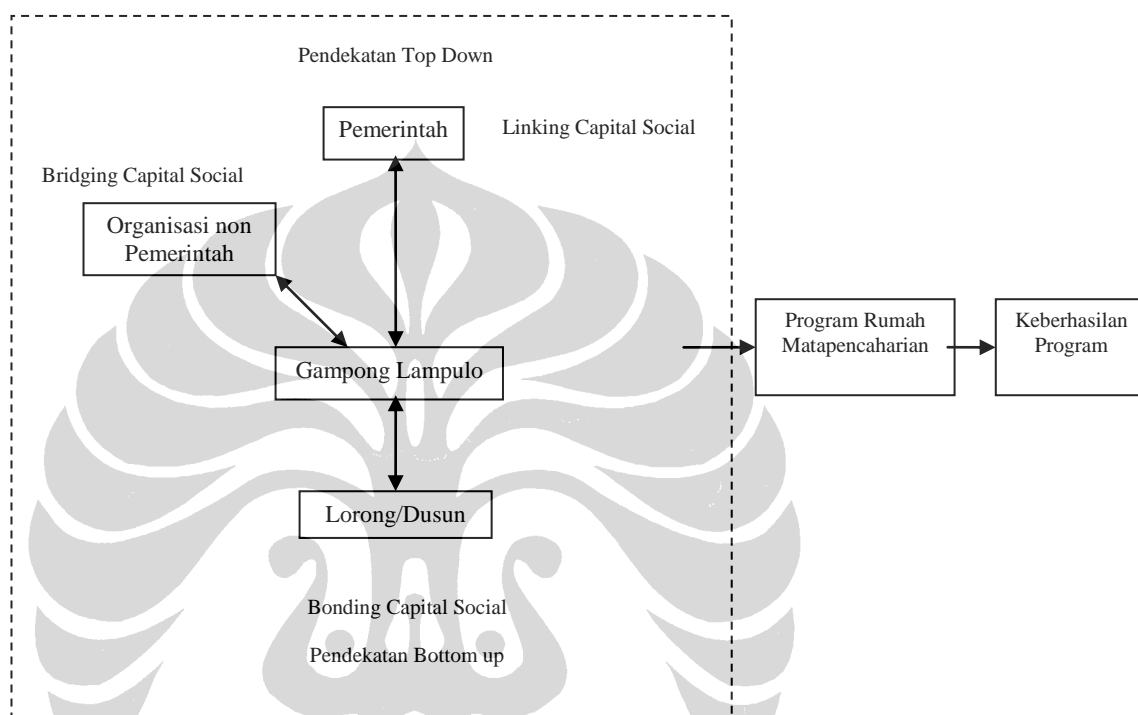
Teori strukturasi bertujuan untuk menghindari determinisme ekstrim antara struktur maupun agen. Keseimbangan antara agen dan struktur ditampilkan dalam struktur dualitas. Struktur sosial menjadikan tindakan sosial dapat terjadi, pada saat yang sama tindakan sosial memengaruhi struktur tersebut. Bagi Giddens struktur merupakan aturan dan sumber daya (seperangkat relasi transformasi) yang dikelola sebagai bagian dari sistem sosial. Peraturan merupakan pola yang menjadi rujukan aktor dalam kehidupan sosial. Sumber daya berhubungan dengan apa yang diciptakan melalui tindakan aktor. Sistem sosial dapat dipahami melalui struktur, modalitas, dan interaksi. Struktur ditentukan oleh pengelolaan dan ketersediaan aturan dan sumber daya bagi agen. Modalitas struktur merupakan cara bagaimana struktur diubah ke dalam tindakan.

Keagenan menurut Giddens dianggap sebagai tindakan manusia; menjadi manusia berarti menjadi seorang agen, meskipun tidak semua agen merupakan manusia. Pengetahuan agen tentang komunitasnya menjadi informasi bagi tindakan mereka, yang dapat menimbulkan reproduksi struktur sosial yang selanjutnya mendorong dan mengarahkan dinamika tindakan. Giddens mendefinisikan "*ontological security*" sebagai kepercayaan aktor pada struktur sosial; tindakan-tindakan sehari-hari mempunyai tingkat perkiraan, yang menjadi jaminan stabilitas sosial. Hal ini tidak selalu tepat, meskipun kedudukan keagenan sedikit berbeda dengan tindakan normatif, dan tergantung pada sejumlah faktor sosial yang bekerja, yang mungkin akan menggeser struktur sosial. Dinamika antara keagenan dan struktur menjadikan suatu tindakan generatif dapat terjadi. Jadi keagenan dapat mengakibatkan reproduksi dan transformasi masyarakat. Pemahaman ini dijelaskan lebih jauh oleh Giddens dengan konsep "*reflexive monitoring of actions*", yaitu kemampuan menilai tindakan dalam kaitannya dengan keefektifannya dalam mencapai tujuan. Jika agen dapat melakukan reproduksi struktur melalui tindakan, maka agen juga dapat mengubah struktur tersebut.

Giddens mengidentifikasi tiga jenis struktur dalam sistem sosial sebagai pembeda analisis, yaitu signifikansi, legitimasi dan dominasi. Signifikansi menghasilkan makna melalui pengorganisasian bahasa (kode semantik, skema interpretasi dan praktek diskursif). Legitimasi menghasilkan tatanan moral melalui naturalisasi dalam nilai-nilai, norma dan standar. Sedangkan dominasi menghasilkan praktek kekuasaan, yang berasal dari penguasaan sumber daya.

1.4. Kerangka Berpikir dan Definisi Operasional

Kerangka berpikir dalam studi ini disusun berdasarkan teori Woolcock mengenai kapital sosial seperti terlihat dalam Gambar 1.4.



Gambar 1. 3. Kerangka Berpikir

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap beberapa konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini akan dijelaskan secara singkat arti atau “definisi” dari beberapa konsep tersebut.

1. Kapital sosial *bonding*, merupakan kapital sosial yang tertambat pada struktur komunitas lokal (gampong, lorong). Kekuatan kapital sosial ini dilihat dari tingkat integrasi dalam komunitas dan tingkat jangkauan komunitas berhubungan dengan keberadaan organisasi dan sumber daya sosial yang berasal dari luar komunitas tersebut
2. Kapital sosial *bridging*, merupakan kapital sosial yang tertambat pada struktur organisasi dari luar komunitas yang menjalankan program pemulihan pasca bencana di desa Lampulo. Kekuatan kapital sosial dilihat tingkat integrasi

organisasi yang berkaitan dengan kapasitas dan koherensi organisasi dalam mengelola program dan tingkat sinergi organisasi dengan organisasi lain yang terlibat dalam suatu program.

3. Keberhasilan program pemulihan pascabencana yaitu tercapainya tujuan program. Dalam penelitian ini program pembangunan yang dikaji adalah program pembangunan rumah dan mata pencaharian bagi korban bencana di desa Lampulo. Indikator keberhasilan program pembangunan rumah antara lain: jangka waktu selesainya pembangunan rumah, cepatnya rumah ditempati, serta kurangnya keluhan terhadap rumah yang sudah dibangun. Sementara itu, indikator keberhasilan program pemulihan mata pencaharian adalah bantuan dapat dibagikan, kurangnya keluhan terhadap bantuan yang diberikan dan kelanjutan mata pencaharian penerima program.

1.5. Tujuan Studi

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari studi ini meliputi dua hal pokok, yakni:

1. Mengidentifikasi wujud kapital sosial yang ada Desa Lampulo.
2. Mengkaji peran atau fungsi kapital sosial dalam menentukan tingkat keberhasilan program pemulihan pasca bencana di Desa Lampulo.

1.6. Keterbatasan Studi

Dalam mendukung keberhasilan suatu program kapital sosial tidaklah berdiri sendiri, namun didukung oleh kapital manusia dan kapital fisik. Dalam studi ini analisis tentang kapital manusia dan kapital fisik tidak dilakukan secara mendalam. Pada sisi lain pasca bencana kondisi Lampulo mengalami kerusakan pada kapital fisik dan kapital manusia. Untuk mengatasi hal ini penulis berusaha mendapatkan gambaran lebih lengkap dari berbagai sumber yang masih hidup memahami kondisi Lampulo sebelum, pada saat bencana dan pasca bencana.

Selain itu penulis juga menghadapi keterbatasan sebagai orang yang berasal dari luar Aceh yang juga ikut terlibat dalam program pemulihan pasca bencana di desa Lampulo. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penulis tinggal di desa ini, dan dibantu oleh beberapa warga lokal dan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala yang pernah melakukan penelitian di desa Lampulo. Dukungan dari mereka berguna bagi penulis untuk memahami bahasa dan makna dari informasi yang disampaikan narasumber lokal, pengamatan dan diskusi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menuntut kepekaan peneliti untuk menangkap setiap fenomena yang dan mencari tahu lebih dalam tentang fenomena tersebut. Berkaitan dengan pengukuran kondisi kapital sosial dan tingkat keberhasilan, penulis memakai indikasi-indikasi yang muncul dari hasil wawancara, pengamatan dan data sekunder melalui triangulasi. Untuk menghindari subyektifitas penulis, melakukan diskusi-diskusi dengan beberapa orang di Aceh dan Jakarta untuk endapatkan penilaian yang lebih obyektif. Sela

1.7. Hipotesis kerja

Kapital sosial mempunyai fungsi dalam mendukung keberhasilan program pemulihan pasca bencana

1.8. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis, praktis dan metodologis sebagai berikut :

1. Secara praktis hasil studi ini diharapkan dapat menggambarkan secara memadai pengelolaan program pemulihan bencana oleh organisasi pemerintah atau nonpemerintah dalam suatu komunitas yang mengalami bencana agar menjadi masukan pada pola penanganan bencana yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Secara teoretis penelitian ini memberikan manfaat menjelaskan kapital sosial dan fungsinya dalam pengelolaan bencana, karena pengelolaan bencana sering kali dikaitkan dengan isu-isu teknis dan solusi untuk

penyelesaian masalah teknis, namun masih sangat jarang dikaitkan dengan masalah sosial.

3. Dari segi metode penelitian mencoba memberikan alternatif penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus terutama dalam studi tentang kapital sosial yang sering kali dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif.

1.9. Metodologi

1.9.1. Pendekatan Penelitian.

Kapital sosial merupakan suatu entitas yang tertambat pada institusi sosial. Individu menggunakan institusi sosial untuk mencapai tujuannya. Keputusan individu dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan institusi dan pilihan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pertimbangan produktivitas yang rasional. Tindakan sosial merupakan bagian yang penting dalam kapital sosial, jika individu tidak bertindak, maka tidak ada dampak kapital sosial dalam tercapainya suatu tujuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memberi makna pada tindakan sosial. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah, *pertama* masalah yang diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis, yakni tindakan-tindakan aktor dan institusi sosial dalam praktik-praktik menghadapi bencana dan mempertahankan sistem sosial yang sudah ada. Para aktor mengembangkan pemikiran dan tindakan mereka dengan melibatkan sistem simbol, struktur sosial dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, tindakan sosial dapat diamati dan dijelaskan melalui praktik sosial yang memberikan gambaran proses perubahan relasi aktor dan struktur sosial.

1.9.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif⁸ yang mencoba memahami suatu fenomena, dengan menggunakan strategi studi kasus. Penelitian

⁸ Deskriptif kualitatif bertujuan untuk melakukan kritik kelemahan penelitian kuantitatif yang dianggap terlalu positivistik, serta bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda, gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. (Bungin, 2007:68)

studi kasus dilakukan melalui pengamatan, kelompok diskusi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan subyek yang dipilih secara *puposive* dengan menggunakan informan kunci. Peneliti menangkap proses interpretasi melalui cara aktor menafsirkan peristiwa sosial. Untuk itu diperlukan *verstehen*, yaitu ketrampilan peneliti untuk mengeluarkan kembali dalam pikirannya sendiri, motif dan pikiran yang ada di balik tindakan sosial.

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi lapangan yang menaruh perhatian pada praktik sosial pemulihan pasca bencana. (Stake dalam Denzin, 1994:236-237). Studi kasus ditandai dengan kegiatan untuk mengumpulkan data dalam upaya peneliti menggali proses terjadinya peristiwa atau pengalaman aktor sosial dalam suatu kejadian (Creswell, 1994:71). Selain itu studi kasus merupakan metode yang tepat ketika diperlukan pemahaman yang utuh dan mendalam (Feagin, Orum, & Sjoberg, 1991). Kasus ditelusuri secara mendalam dengan memperhatikan konteksnya, serta memaparkan aktivitas yang terjadi secara rinci. Kasus-kasus yang ditemukan dikategorisasi secara tipikal. Melalui kasus-kasus tipikal tersebut dilakukan upaya rekonstruksi untuk mendapatkan pola substantif yang cocok dengan kategori formal dalam teori kapital sosial. (Denzin, 1994:236-237).

Kasus ini melibatkan sejumlah informan kunci yang dipilih secara sengaja dengan merujuk pada institusi sosial yang ada dalam masyarakat, yang diperoleh dari profil komunitas hasil kelompok diskusi. Oleh karena itu penelitian ini akan menelusuri profil komunitas dan institusi sosial yang ada di dalam masyarakat maupun organisasi luar yang terlibat dalam pemulihan bencana. Beberapa institusi sosial yang terlibat dalam praktik akan didalami melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dalam institusi tersebut. Informan penelitian dipilih dengan mengikuti acuan Spradley (1978), yaitu *pertama*, orang-orang yang memahami dengan baik kebiasaan setempat meliputi pemimpin desa dan atau daerah serta tokoh-tokoh adat dan budaya setempat. *Kedua*, orang-orang atau aktor yang terlibat dalam kasus pemulihan bencana di desa tersebut; *ketiga* orang-orang yang mempunyai pandangan luas dan sedapat mungkin dapat mengambil jarak dengan kasus tersebut. *Keempat*, mereka yang memiliki kesediaan dan waktu cukup untuk memberikan informasi; dan *kelima*, mereka yang dapat

memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Mengenai subjek penelitian yang berkaitan dengan korporasi, akan dipilih beberapa orang yang dapat mewakili korporasi yang bersangkutan.

1.9.3. Strategi Penelitian

Sebelum turun ke lapangan peneliti mengurus izin penelitian ke kantor walikota Banda Aceh, sekaligus melakukan wawancara dengan kepala seksi penanggulangan bencana kota Banda Aceh. Selanjutnya peneliti membawa surat izin penelitian yang sudah didapat dan melakukan wawancara mendalam dengan *keuchik gampong lampulo*, dan dilanjutkan dengan wawancara dengan *Tuha peut gampong* (semacam Lembaga Musyawarah Desa di tingkat kampong). Wawancara ini sekaligus sebagai pintu masuk untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Langkah selanjutnya peneliti melakukan serangkaian wawancara terfokus yang dilakukan dalam komunitas untuk mendapatkan profil komunitas. Profil komunitas akan memberikan gambaran karakteristik komunitas dan isu-isu yang berkaitan dengan kapital sosial yang berguna bagi peneliti untuk pengumpulan data pada tahapan selanjutnya. Kelompok berdiskusi mengenai definisi komunitas tempat dimana penelitian dilakukan. Definisi dari hasil diskusi digunakan dalam pengumpulan data profil komunitas dan menjadi referensi bagi wawancara institusi sosial. Hasil diskusi juga memberikan gambaran daerah cakupan lembaga untuk membuat profil lembaga sosial. Sebagai tambahan format fokus group, juga mengumpulkan data pemetaan dan diagram kelembagaan komunitas. Sumber data primer lain diperoleh melalui serangkaian wawancara, pemetaan, dan pembuatan diagram.

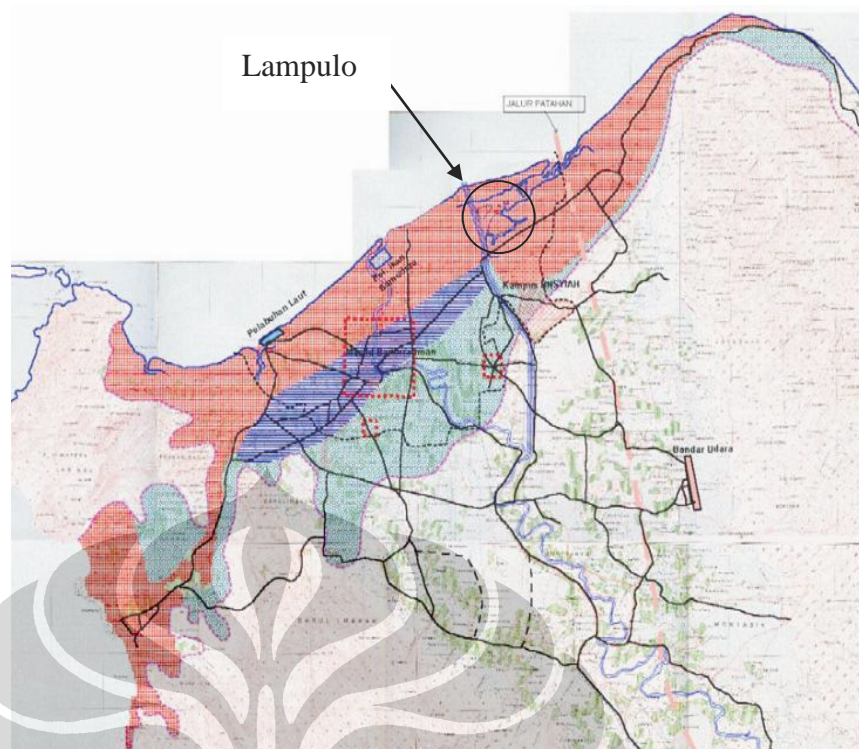
Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam kepada pimpinan lembaga dan anggota lembaga sosial untuk mendapatkan profil lembaga sosial. Profil lembaga sosial berguna untuk menggambarkan hubungan dan jaringan yang ada dan memaparkan hubungan lembaga formal maupun informal yang beroperasi dalam komunitas untuk mengukur kapital sosial. Profil ini akan menggambarkan latar belakang dan perkembangan lembaga (secara historis dan konteks masyarakat, latar belakang, dan kelangsungan lembaga); kualitas keanggotaan (alasan orang bergabung, tingkat keterbukaan lembaga); kapasitas lembaga

(kualitas kepemimpinan, partisipasi, budaya lembaga, dan kapasitas kelembagaan), dan jaringan kelembagaan.

Dipilih empat lembaga internal dan empat lembaga eksternal (satu dari lembaga pemerintah yaitu BRR dan tiga dari lembaga nonpemerintah yaitu, Aceh Relief, Kata Hati dan Care Internasional) yang diidentifikasi terlibat dalam program pemulihan pascabencana. Terhadap mereka dilakukan wawancara terstruktur dengan informan kunci yang dipilih karena penulis menganggap organisasi paling berpengaruh dalam program pemulihan pascabencana di Lampulo. Untuk setiap profil lembaga, wawancara perlu dilakukan pada para pemimpinnya, anggota-anggotanya. Untuk mendapatkan perspektif dan penilaian tentang keberhasilan program juga dilakukan pengamatan dan wawancara dengan warga yang menerima program. Untuk melengkapi data yang sudah ada, dilakukan analisis dokumen dan data sekunder untuk mendapatkan penjelasan makro tentang program pemulihan pascabencana di Aceh secara umum.

1.9.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian kasus ini dilakukan di desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.



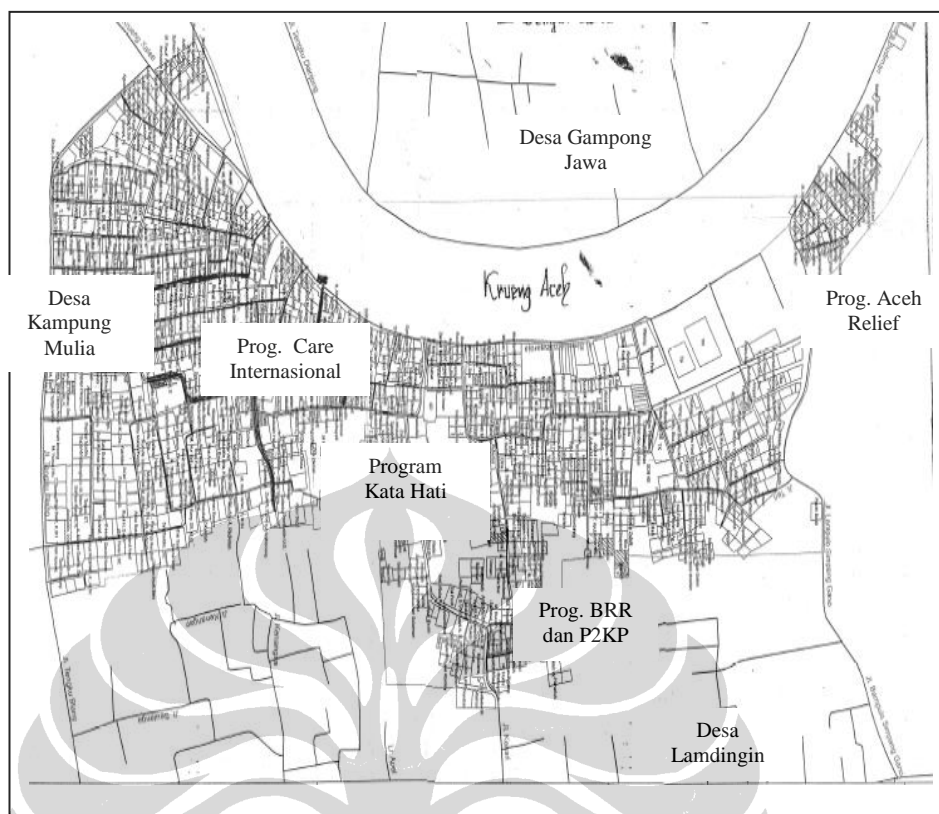
Gambar 1.1. Daerah yang terkena dampak tsunami di Kota Banda Aceh

Keterangan :

- : Wilayah rusak total (bangunan bahkan pondasi rusak total)
- : Wilayah rusak struktur (bangunan tidak seluruh roboh, struktur patah, miring, dll)
- : Wilayah rusak sedang (retak-retak pada dinding dan pagar dll)

Desa Lampulo mempunyai empat dusun antara lain, Dusun Teungku Dipulo (lorong satu), Malahayati (lorong dua), Teungku Disayang (lorong tiga) dan Teungku Diteungoh (lorong empat). Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja yang didasarkan pada pertimbangan praktis dari peneliti saat penelitian ini sedang dilakukan yakni di Kodya Banda Aceh. Selain itu karena dari pengamatan awal di desa tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam tingkat keberhasilan program. Ada organisasi yang berhasil menyelesaikan programnya dengan baik, namun ada juga organisasi yang tidak berhasil menyelesaikan programnya dengan baik (lihat di latar belakang masalah).

Studi ini dilakukan pada Januari – Desember 2007, dimana penulis tinggal di lapangan dan berinteraksi langsung dengan komunitas dan organisasi yang terlibat dalam program di desa Lampulo..



Gambar 1.5. Peta Lokasi Desa Lampulo

Lampulo terletak di wilayah kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayahnya 45 Ha, terbagi menjadi 4 dusun yaitu : dusun Tengku Dipulo (Lorong satu) dengan kepala dusun M. Zubir Ali, dusun Teungku Diteungoh kepala dusunnya Alta Zaini (Lorong empat), Dusun Disayang kepala dusun Razali (Lorong tiga), dan dusun Malahayati (lorong dua) dengan kepala dusun H.M. Taeb Bardan.

Sebelum terjadinya tsunami, penduduk berjumlah sebanyak 6.322 jiwa dan 1.602 Kepala Keluarga (KK). Setelah tsunami, jumlah penduduk tinggal 3.589 jiwa dengan 1.753 KK. Terlihat jelas bahwa jumlah penduduk berkurang hampir separuh, sementara KK malah bertambah sesudah bencana tsunami, dari 1.602 menjadi 1.753 KK. Pertambahan jumlah KK ini disebabkan berdatangnya penduduk yang dahulunya adalah warga Lampulo yang menetap di luar dan sebagian lagi adalah pendatang baru. *Keuchik* memberi penjelasan lebih lanjut bahwa pertambahan KK ini juga disebabkan oleh diberikannya KK bagi seorang anak walaupun masih di bawah umur. Anak tersebut selamat dari tsunami

sementara seluruh anggota keluarganya termasuk orang tuanya hilang pada saat bencana. Dari data yang ada di catatan kantor desa Lampulo, sedikitnya terdapat 137 anak yatim piatu di Lampulo. Di antara mereka masih ada yang tinggal di tenda-tenda bersama wali-wali mereka menunggu diselesaikannya pembangunan rumah.

Penduduk Lampulo pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan (800 orang), selebihnya adalah pedagang (250 orang), Pegawai Negeri Sipil (200 orang). Lainnya berprofesi sebagai tukang, wiraswasta, dan sebagainya.

Jarak *gampong* Lampulo ke kota kecamatan Kuta Alam sejauh 1 kilometer, dan jarak tempuh ke pusat kota Banda Aceh sejauh 6 kilometer. Adapun batas-batas wilayah desa Lampulo adalah:

- Sebelah Utara : Kuta Alam
- Sebelah Selatan : Kelurahan Peulanggahan
- Sebelah Barat : Kelurahan Kampung Mulia
- Sebelah Timur : Kelurahan Lamdingin dan Laut

Berdasarkan laporan bulanan Desa pada November 2006:

- Jumlah Perempuan : 1.812 jiwa
- Jumlah Laki-laki : 2.160 jiwa
- Total Jumlah Penduduk : 3.972 jiwa

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Informasi dan data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah :

- 1) Informasi struktur sosial :
 - a) Struktur internal kelompok masing-masing lorong
 - b) Hubungan antar individu atau keluarga dalam kelompok
 - c) Hubungan antara kelompok dan pemerintah.
 - d) Hubungan antara kelompok dan masing-masing NGO
- 2) Informasi program pembangunan :
 - a) Kerusakan fisik di Lampulo
 - b) Penurunan kemampuan sumber daya manusia

- c) Penurunan kemampuan sumber daya sosial
- d) Program- program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan oleh :
 - i) Pemerintah (BRR, P2KP)
 - ii) NGO Care
 - iii) NGO Kata Hati
 - iv) NGO Aceh Relief
- e) Masalah yang dihadapi kedua belah pihak :
 - i) Masalah menurut orang Lampulo.
 - ii) Masalah menurut NGO
 - iii) Mekanisme pengatasan masalah ad hoc.

Pengumpulan data dalam studi ini menggunakan teknik yang saling melengkapi, yaitu *pertama*, melakukan eksplorasi untuk mendapatkan data-data sekunder dan pemahaman secara umum mengenai proses yang sedang berlangsung dalam proses pemulihan dan rekonstruksi bencana tsunami di Nangroe Aceh dan khususnya di desa yang menjadi lokasi penelitian.

Kedua, melakukan diskusi kelompok untuk mendapatkan profil komunitas dan institusi dalam masyarakat, dan wawancara mendalam dengan informan kunci (lihat pedoman wawancara) yang dipilih secara cermat untuk mendapatkan berbagai kategori yang menjadi penjelasan sebagai berikut : a). praktik keterlibatan aktor dan institusi sosial dalam program pemulihan dan rekonstruksi bencana, b). pola dan mekanisme interaksi antaraktor, dan c) proses yang terjadi, hasilnya serta dampak dan harapan dalam praktik atau tindakan yang terjadi. Di samping itu juga dilakukan diskusi kelompok terfokus, yaitu diskusi ahli yang dilakukan bersama dengan orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang proses pemulihan dan rekonstruksi di kedua desa tersebut dan peran kapital sosial dan kapital lainnya dalam proses tersebut. Selanjutnya dilakukan sistematisasi untuk menemukan model yang dapat diterapkan. Setelah hal ini dilakukan yang akan dilanjutkan dengan uji coba model untuk memperoleh tipologi hubungan kapital sosial dalam proses pemulihan dan rekonstruksi bencana. Temuan ini akan dievaluasi melalui diskusi kelompok terfokus untuk mendapatkan model yang lebih diterima.

Ketiga, dilakukan studi dokumentasi perihal proses pemulihan dan rekonstruksi bencana, terutama yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di antara individu, keluarga dan kelompok. Data ini berasal dari rekaman pertemuan-pertemuan yang diadakan selama proses pemulihan bencana baik dari hasil rapat, media masa maupun laporan-laporan yang lain.

Keempat, untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai relasi yang terjadi diantara kelompok-kelompok yang terlibat dalam program pemulihan pasca bencana dilakukan pengamatan selama lebih kurang enam bulan.

Tabel 1.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data	Wawancara	Pengamatan	Kelompok Diskusi	Data sekunder
Kapital sosial komunitas Lampulo	v	v	v	v
Kapital sosial organisasi	v	v	v	v
Relasi antar kapital sosial	v	v	v	
Keberhasilan program	v	v	v	v

Tabel 1.5. Indikasi Pengukuran Kapital Sosial

Aspek Pengukuran	Indikasi Pengukuran
Integrasi komunitas	- Kesamaan pekerjaan, etnis, daerah, kerabat - Aksi kolektif yang muncul
Jejaring komunitas	- Jejaring dengan organisasi luar sebelum tsunami - Jejaring dengan organisasi luar setelah tsunami - Kerjasama dan konflik dengan organisasi luar
Integrasi organisasi	- Kapasitas organisasi - Cakupan kerja organisasi - Kecepatan realisasi program yang dijanjikan - Perubahan strategi dan struktur organisasi - Kerumitan birokrasi
Sinergi organisasi	- Tingkat persaingan dengan organisasi lain - Koordinasi dengan organisasi lain - Perubahan harga dan
Kinerja kapital sosial	- Aksi kolektif yang muncul - Keluhan dan ketidakpercayaan yang muncul - Konflik yang terjadi - Penyelesaian konflik
Keberhasilan program	- Tingkat penyelesaian rumah - Kecepatan penyelesaian rumah - Kualitas penyelesaian rumah - Tingkat penghunian rumah

1.9.6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat *eclectic; there is no "right way"* dalam proses analisis kualitatif (Creswell, 1994:153). Dalam proses penelitian lapangan dilakukan pengembangan kategori-kategori dan membuat perbandingan dan pertentangan antar kategori yang muncul. Peneliti juga terbuka pada kemungkinan lain untuk melihat kebalikan atau jawaban alternatif dalam temuan-temuan yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data dan informasi melalui proses interpretasi. Peneliti mengambil sejumlah informasi dan memasukkannya dalam kategori-kategori kapital sosial dan kemudian menafsirkan informasi tersebut secara kontekstual.

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dilakukan triangulasi, yakni pengumpulan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda. Dengan demikian kelemahan informasi dapat diuji oleh data yang diperoleh dari sumber yang lain (Patton, 1980; Huberman, 1984; Nasution, 1988). Dalam memahami berbagai keterangan dilakukan interpretasi dialogis dengan informan kunci untuk makna objektif dan makna subjektif para aktor secara berkelanjutan.

Analisis data kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum. Dengan demikian analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta, bukan sekedar menjelaskan fakta tersebut. Tahapan-tahapan analisis, adalah sebagai berikut : seperti yang disebut Bungin (2007:144)

1. Melakukan pengamatan, wawancara terhadap fenomena sosial, melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pemeriksaan ulang terhadap data yang ada.
2. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh
3. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi
4. Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi
5. Menarik kesimpulan umum
6. Membangun atau menjelaskan teori

1.10. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan landasan pemikiran dalam tulisan ini yang berisi latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian teori, kerangka konseptual, hipotesis kerja, metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Dalam kajian teori dibahas teori, teori tentang kapital sosial, kritik terhadap kapital sosial dan teori kapita sosial Woolcock yang dijadikan kerangka berpikir dalam studi ini. Dalam kajian teori ini juga dibahas teori tentang struktur sosial, karena secara teoritis kapital sosial melekat pada struktur sosial. Kajian teori ini menjadi dasar dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan kerangka model dalam penelitian.

Pada bab II membahas kapital sosial yang melekat pada struktur sosial masyarakat Lampulo yang meliputi institusi gampong, institusi ekonomi panglima laot, kekerabatan dan institusi lorong. Dalam institusi gampong dan masing-masing lorong akan dibahas aspek demografis, hubungan keluarga dan kekerabatan, peta sosial permukiman, tugas kepala lorong dan relasi kepala lorong dengan keuchik. Dalam bab ini juga membahas program perumahan yang dilakukan lembaga luar di lorong tersebut. Pokok pembahasan pengendalian sosial dan ketahanan masyarakat di tingkat lorong dan desa juga akan dipaparkan dalam bab ini. Berdasarkan interaksi yang muncul dalam struktur sosial ini, akan dilakukan analisis tingkat integrasi dan jejaring kapital sosial “bottom up” lorong dan desa Lampulo.

Bab III membahas program pembangunan dan pelaksanaan masing-masing lorong yang dilakukan, yaitu Lorong satu yang dilakukan oleh Care International, BRR dan Kata Hati. Lorong dua yang dilakukan oleh Care International, BRR, dan Kata Hati, di Lorong tiga yang dilakukan oleh Aceh Relief dan Lorong empat yang dilakukan oleh BRR. Bab ini juga membahas kapital sosial dalam proses pemulihan yang terjadi di Lorong satu, Lorong dua, Lorong tiga dan Lorong empat. Analisis kapital sosial organisasi yang terlibat dalam program pemulihan

di desa Lampulo dibahas dalam bab ini dari aspek Integrasi dan sinerginya dengan organisasi lain dalam program perumahan.

Bab IV merupakan diskusi teoritis dari hasil penelitian berkaitan dengan dinamika relasi kapital sosial dalam pendekatan *bottom up* yang berasal dari komunitas dan kapital sosial dalam pendekatan *top down* yang melekat pada organisasi-organisasi yang terlibat dalam program pemulihan perumaha di Lampulo. Relasi antar kapital sosial tersebut akan dianalisis dalam hubungannya dengan keberhasilan suatu program dan sinerginya dengan kapital fisik, kapital manusia dan kapital sosial dalam suatu program pemulihan.

Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang bermanfaat untuk melakukan studi yang akan datang, khususnya mengenai hubungan kapital sosial dalam program-program penanggulangan bencana. selain itu dibahas beberapa masukan-masukan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang sering terjadi di Indonesia.

